



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

NOMOR : W12- 34.PR.01.03 Tahun 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2019, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang berlaku di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);


6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.
- KEDUA : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound).



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 Maret 2020
KEPALA KANTOR WILAYAH


IMAM SUYUDI
NIP. 196312071987031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA BANTEN
 NOMOR : W12- 34.PR.01.03 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
 LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
 DAN HAM BANTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Survei Internal Balitbangkumham & Penilaian Itjen	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian Itjen		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Penilaian Itjen		
Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU	Penilaian Ditjen AHU	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Penilaian Ditjen AHU (Realisasi layanan program AHU yang diselesaikan Tahun 2020/Target layanan program AHU yang diselesaikan Tahun 2020) X 100%		
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	Penilaian Ditjen KI (Realisasi penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah Tahun 2020 / Target penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah Tahun 2020) X 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	Penilaian Ditjen KI (Realisasi pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah Tahun 2020 / Target pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah Tahun 2020) X 100%		
	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	Penilaian Ditjen KI (Realisasi Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Tahun 2020 / Target Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Tahun 2020) X 100%		
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	Penilaian Ditjen PP (Realisasi rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi Tahun 2020 / Target rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi Tahun 2020) X 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	Penilaian Ditjen PP (Realisasi perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan Tahun 2020 / Target perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan Tahun 2020) X 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Penilaian Ditjen HAM (Realisasi pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Tahun 2020 / Target pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM Tahun 2020) X 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Penilaian Ditjen HAM (Realisasi jumlah Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2020 / Target jumlah Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2020) X 100%		
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM di	Penilaian Ditjen HAM (Realisasi instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM Tahun 2020 / Target instansi pemerintah yang		

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
	Kantor Wilayah	menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM Tahun 2020) X 100%		
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	Penilaian Ditjen HAM (Realisasi rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Tahun 2020 / Target rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Tahun 2020) X 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Riset	Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penilaian Balitbangkumham	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Penilaian Balitbangkumham (Realisasi Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah Tahun 2020 / Target Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah Tahun 2020) X 100%		
Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	Penilaian BPHN (Realisasi orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi Tahun 2020 / Target orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi Tahun 2020) X 100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	Penilaian BPHN (Realisasi kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin Tahun 2020 / Target kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin Tahun 2020) X 100%		
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	Penilaian BPHN (Realisasi pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Tahun 2020 / Target pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Tahun		

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
		2020) X 100%		
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Penilaian BPHN (Realisasi penyuluhan hukum di daerah Tahun 2020 / Target penyuluhan hukum di daerah Tahun 2020) X 100%		
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Penilaian BPHN (Realisasi kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah Tahun 2020 / Target kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah Tahun 2020) X 100%		
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	Penilaian BPHN (Realisasi layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN Tahun 2020 / Target layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN Tahun 2020) X 100%		
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	Survei Internal Balitbangkumham & Penilaian Itjen	Kepala Divisi Keimigrasian	Kepala Kantor Wilayah
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	Penilaian BPHN (Realisasi Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2020 / Target Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2020) X 100%		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	Survei Internal Balitbangkumham & Penilaian Itjen	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah
Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Tahun 2020 / Target mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Tahun 2020) X 100%		
Terwujudnya mantan narapidana/ anak yang taat hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	Penilaian Ditjen Pemasarakatan (Realisasi menurunnya residivis di wilayah Tahun 2020 / Target menurunnya residivis di wilayah Tahun 2020) X 100%		

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	Penilaian Ditjen Pemasaryakatan (Realisasi anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Tahun 2020 / Target anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Tahun 2020) X 100%		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN/ PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI	Jumlah unit kerja yang memperoleh IPK minimal 13.5, minimal IKM 16, dan TLHP minimal 5	TIM Kerja Pembangunan ZI	Kepala Divisi Administrasi



KEPALA KANTOR WILAYAH

IMAM SUYUDI
NIP. 196312071987031001